

ANALISIS HUBUNGAN DAU, PAD DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Oleh:

Juliana Florence Sorongan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado.
email: soronganflorencjulia@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pesatnya pembangunan daerah yang ada di Indonesia seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan kegiatan fiskal, membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah. Belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di kabupaten Minahasa tahun 2007-2011 serta perkembangannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder berupa data yang diperoleh dari Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Metode analisis yang digunakan Analisis Korelasi. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa hubungan DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah rendah dan tidak berpengaruh. Disamping itu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber utama PAD sesuai analisis hubungan Pajak Daerah pada PAD terhadap Belanja Daerah adalah sangat kuat ini menunjukkan Pajak Daerah memberikan hubungan yang signifikan kepada PAD dalam kegiatan belanja Daerah.

Kata kunci: dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, belanja daerah.

ABSTRACT

The rapid development of the region in Indonesian line with the implementation of regional autonomy and fiscal activities, requires the allocation of funds from the local government. With the ever increasing expenditure required to funds that local government expenditure needs can be met. The purpose of this study was to determine whether there is a relationship between the General Allocation Fund, Local Revenue, Taxes and levies to Minahasar agency Expenditure in the year 2007-2011 as well as its development. The data used in this study is a secondary data in the form of the data obtained from the Department of Revenue and Asset Finance Manager South Minahasa regency. The analytical method used is Correlation Analysis. The results show that the relationship of the DAU and revenue Expenditure is Low and has no effect. Besides Local Taxes and Levies as a major source of revenue corresponding analysis of the relationship of the Regional Tax on Expenditure PAD is very strong shows local taxes provide a significant relationship to the PAD in regional shopping activities.

Keywords: general allocation fund, revenue, shopping area.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan daerah di Indonesia semakin pesat, seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan digulirnya undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan Undang-undang No.32 tahun 2004 dan undang-undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan undang-undang No.33 tahun 2004 membawa perubahan pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah, juga merupakan langkah awal dimulainya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada dasarnya adalah upaya penyempurnaan dari kebijakan masa lalu yang bersifat sentralistis. Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi.

Pembangunan daerah tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel kepada masyarakat. Selain itu, otonomi daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat diseluruh daerah, sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tentram, dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat dan harga diri.

Peranan pemerintah daerah sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan baik aspek mikro maupun makronya. Peran pemerintah daerah dapat dilihat dari aspek regulasi/ kebijakan pembangunan daerah didalam hal ini kemampuan mengelola anggaran daerah. Untuk itu dibutuhkan *good will* pemerintah daerah dalam menjalankan atau mengendalikan anggaran daerah secara efektif dan efisien.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah di kabupaten Minahasa Selatan. dan Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok yaitu: Penyediaan informasi, Pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategi, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kerja, dan pelaporan kinerja.

Mardiasmo (2009) menyatakan "sektor publik" memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luas wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang Ilmu Ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha yang menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Bastian (2006) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai: "mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta".

Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association (1970) Glynn (1993) dikutip dalam (Mardiasmo, 2009:14) menyatakan bahwa tujuan Akuntansi pada sektor publik adalah untuk :

1. Memberikan Informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan Pengendalian manajemen (*Management control*)
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan Akuntabilitas (*Accountability*)

Standar Akuntansi Sektor Publik

Mahsun *et al* (2006:65) dalam buku *Akuntansi Sektor Publik* menyatakan Standar Akuntansi Sektor Publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Pemerintah sudah menerapkan standar akuntansi untuk pemerintahan yang disebut Standar Akuntansi pemerintah (SAP). Standar akuntansi ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan Standar Akuntansi Sektor Publik yang memuat tentang elemen-elemen standar akuntansi. Pernyataan tersebut dinamakan Pernyataan Standar Akuntansi Sektor Publik, yang di pemerintahan disebut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah jika menurut peraturan perundang-undangan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk pemerataan dan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. (Darise, 2009)

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Darise, 2009)

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Siahaan, 2010)

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dibagi atas tiga golongan: Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha, Retribusi perizinan tertentu (Darise, 2009)

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja.

Penelitian Terdahulu

Saraji (2010) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/kota Di Jawa Tengah Tahun 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil uji simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD dan DAU dengan belanja modal

pada Kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2008. Utami (2007) melakukan penelitian dengan judul Analisis Hubungan Dana Alokasi Umum, Bagi hasil Pajak dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Rutin Kota Samarinda. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui Hubungan Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Rutin di kota Samarinda pada Tahun 2001– 2010 dan untuk menganalisis kemungkinan terjadinya *flypaper effect* pada Belanja Rutin di kota Samarinda pada Tahun 2001 – 2010. Hasil menunjukkan Terdapat hubungan yang nyata antara variabel dependen dan independen dan Variabel Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Asli Daerah secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Samarinda, dan Terjadi *flypaper effect* dimana Dana Alokasi Umum yang merupakan dana bantuan dari pemerintah pusat berpengaruh signifikan. Persamaan dengan penulisan skripsi ini yaitu untuk membahas tentang hubungan DAU, PAD dan Belanja Daerah. Namun perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian, dimana penelitian ini mengambil tempat penelitian di Minahasa Selatan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sugiyono (2011:13) menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah langsung ke sumber data, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian.

Tempat dan Waktu

Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. Proses Penelitian ini dilakukan pada bulan November-Desember 2012.

Prosedur Penelitian

Adapun langkah – langkah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penelitian pada Kantor Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan Penelitian
2. Disposisi Pimpinan
3. Pengumpulan Data
4. Analisa Data Penelitian
5. Analisa Penerapan
6. Kesimpulan dan Saran

Populasi Dan Sampel

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2003 : 103). Populasi dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Minahasa Selatan. Sampel adalah bagian populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. Untuk memperoleh sampel yang dapat mewakili karakteristik populasi, diperlukan metode pemilihan sampel yang tepat. Sampel dari penelitian ini adalah Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2007-2011.

Metode Pengumpulan Data

Sehubungan dengan aktivitas usaha untuk mengumpulkan data maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan metode kepustakaan. Metode penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung pada objek yang diteliti dengan cara:

- a. Observasi (Pengamatan)
- b. Interview (Wawancara)

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Korelasi (Hubungan). Analisis deskriptif adalah untuk mengetahui hubungan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan menggunakan metode ini penulis dapat mengetahui besarnya Hubungan Dana Alokasi Umum (X1) dan Pendapatan Asli Daerah (X4) terhadap Belanja daerah (Y) di Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2007 sampai 2011. dan hubungan antara Pajak Daerah (X2) dan Retribusi daerah (X3) terhadap Belanja Daerah (Y)

Persamaan yang digunakan dalam analisis korelasi yaitu:

1. $BD_t = \alpha + \beta DAU_{t-1} + \beta PAD_{t-1}$
2. $PAD_{t-1} = \alpha + \beta PD_{t-1} + \beta RD_{t-1}$

Definisi dan Pengukuran Variabel

Dana Alokasi Umum (X1) adalah sumber utama bagi pendapatan daerah dalam rangka keseimbangan secara vertikal dan horisontal yang diperoleh dari Pemerintah pusat pada tahun 2007-2011 dan dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp). Pendapatan Asli Daerah (X4) adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang terdiri dari penerimaan pajak, retribusi daerah, Laba Usaha Daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Penerimaan rutin daerah yang berasal dari pungutan (pajak, retribusi) dan hasil dari perusahaan daerah lainnya serta hasil usaha daerah yang sah pada tahun 2007-2011, yang diukur dalam satuan rupiah. Belanja Daerah (Y) adalah anggaran dalam APBD yang disediakan untuk menyelenggarakan tugas umum dan pelaksanaan pembangunan. Jumlah Belanja Daerah pada tahun 2007-2011, diukur dalam satuan Rupiah. Bagian belanja yang berupa : belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan. Hasil manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (Publik) Belanja Pelayanan Publik Bagian belanja yang berupa: Belanja Administrasi Umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/ pembangunan yang diberikan atau yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang manfaatnya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (Publik). Pajak daerah (X2) adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah yang dimaksud adalah pajak daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang diukur dalam satuan rupiah (Rp) per tahun selama 2007-2011. Retribusi Daerah (X3) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Retribusi yang dimaksud adalah retribusi daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang diukur dalam satuan rupiah (Rp) per tahun selama 2007-2011.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Sejalan dengan bergulirnya nuansa reformasi dan implementasi kebijakan otonomi daerah, maka muncul aspirasi masyarakat di sejumlah wilayah yang mengangkat tema antara lain untuk melakukan pemekaran daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Demikian pula aspirasi masyarakat di wilayah Minahasa Selatan, yang menginginkan pemekaran wilayahnya menjadi daerah otonom sebagai pemekaran dari Kabupaten Minahasa. Maksud Pemekaran daerah ini pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil, guna dalam rentang kendali (*span of control*) penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan dan pelayanan masyarakat.

Dengan tujuannya adalah terwujudnya peningkatan pengelolaan potensi daerah dan secara lebih optimal: terwujudnya pengembangan kehidupan demokrasi, peran serta masyarakat serta rasa keadilan dan pemerataan pembangunan; untuk lebih mendayagunakan pencapaian tujuan pemberian otonomi daerah yang pelaksanaannya memperhatikan potensi daerah, keanekaragaman dan kepentingan masyarakat di daerah guna kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Minahasa Selatan terletak antara $0^{\circ} 45'$ - $1^{\circ} 20'$ Lintang Utara dan $124^{\circ} 15'$ - $124^{\circ} 50'$ Bujur Timur. Letak geografis Kabupaten Minahasa Selatan berada pada posisi tengah Jazirah propinsi Sulawesi Utara, yang secara administratif terletak di sebelah Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara
- Timur : Berbatasan dengan Laut Maluku
- Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow
- Barat : berbatasan dengan Laut Sulawesi

Berdasarkan sensus penduduk, jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa Selatan hingga saat ini sebesar ± 285.624 jiwa. Penduduk Kabupaten Minahasa Selatan tersebar pada bentang wilayah dengan kepadatan yang cukup rendah dan sebagian besar terkonsentrasi di ibu kota kecamatan. Pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan dalam kurun waktu 2010-2015 akan teralisasi dengan adanya Visi dan Misi :

VISI :

“Kabupaten Minahasa Selatan yang BERdaya saing, berIman, dan mandiri melalui PerCepatan dan KeTepatan Pembangunan”

MISI :

1. Sumberdaya Manusia Minahasa Selatan yang Berkualitas
2. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa
3. Masyarakat Minahasa Selatan Yang Beriman dan Berbudaya.
4. Minahasa Selatan Yang Tangguh, Berkualitas (Tinggi dan Merata) dan Kondusif Berbasis Perdesaan
5. Pembangunan Minahasa Selatan yang Berkelanjutan dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata

Hasil Penelitian

Uraian jumlah DAU, PAD dan belanja daerah serta jumlah Pajak Daerah dan Retribusi daerah sepanjang 2007-2011, sebagai berikut:

Tabel 1. Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan

Tahun	DAU	Growth (%)	PAD (%)	Growth (%)	Belanja Daerah	Growth (%)
2007	303,712,000,000	-	5,625,200,000	-	415,270,985,098	-
2008	235,981,000,000	-28.70	4,209,053,938	-33.65	359,006,195,999	-15.67
2009	279,551,364,000	15.59	6,598,234,717	36.21	385,500,408,342	6.87
2010	289,948,951,000	3.59	5,594,269,278	-17.95	378,957,158,444	-1.73
2011	330,854,571,000	12.36	9,407,280,004	40.53	483,807,278,567	21.67

Sumber : Hasil Olahan data,2013

Tabel 2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan

Tahun	Pajak Daerah	Growth	Retribusi daerah	Growth
	(X2)	(%)	(X3)	(%)
2007	2,441,094,943		2,517,921,023	
2008	2,206,747,465	-10.62	1,585,707,509	-58.79
2009	2,394,503,272	7.84	2,145,302,036	26.08
2010	2,490,804,191	3.87	1,139,081,686	-88.34
2011	4,131,145,176	39.71	1,398,222,820	18.53

Sumber : Hasil Olahan data, 2013

Analisis Korelasi

Tabel 3. Hubungan DAU, PAD dan Belanja Daerah

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.074	4.124		1.230	.344
	DAU	.393	.506	.425	.776	.519
	PAD	.208	.215	.528	.964	.437

a. Dependent Variable: BD

Tabel 3 menunjukkan bahwa hubungan antara DAU dengan Belanja Daerah adalah sebesar 0,425. Besarnya nilai koefisien korelasi 0,425 ini berarti adanya hubungan yang rendah dengan Belanja Daerah dan tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Sedangkan hubungan antara PAD dan Belanja Daerah adalah sebesar 0.528 ini berarti adanya hubungan yang rendah antara PAD dengan Belanja Daerah dan tidak berpengaruh.

Tabel 4. Hubungan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Daerah

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.718	4.681		-.581	.620
	PD	1.134	.344	.967	3.296	.081
	RD	.197	.269	.215	.732	.540

a. Dependent Variable: PAD

Tabel 4 menunjukkan bahwa hubungan antara Pajak Daerah dan Belanja Daerah adalah sebesar 0,967 ini berarti adanya hubungan yang sangat kuat antara Pajak daerah pada PAD dengan Belanja Daerah tetapi tidak berpengaruh, sedangkan hubungan antara Retribusi Daerah dan Belanja Daerah tunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,215. Ini berarti hubungan Retribusi Daerah sangat Lemah pada PAD dengan Belanja Daerah dan Tidak berpengaruh.

Pembahasan

Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan Kabupaten Minahasa Selatan selama 5 tahun terakhir mengalami perubahan dari tahun ke tahun selama 2007-2011 dimana pada tahun 2008 terjadi penurunan jumlah DAU menjadi Rp. 235,981,000,000 atau menurun sebesar 28,70% dari periode sebelumnya, dan pada tahun 2009 DAU yang diperoleh Kabupaten Minahasa Selatan meningkat sebesar 15,59% dari periode sebelumnya atau menjadi sebanyak Rp. 279,551,364,000 dan terus meningkat menjadi Rp. 289,948,951,000 pada tahun 2010 atau sebesar 3,59% dan pada tahun 2011 menjadi Rp. 330,854,571,000 atau meningkat 12,36%. Naik turunnya DAU selama 5 tahun terakhir ini disebabkan karena Jumlah Gaji Pegawai Negeri Sipil yang setiap tahun berubah.

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang juga mengalami perubahan selama 5 tahun terakhir 2007-2011 dimana pada tahun 2008 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 359,006,195,999 atau menurun sebesar 15,67% dan pada tahun 2009 menjadi Rp. 385,500,408,342 atau meningkat 6,87% dari tahun sebelumnya, dan kembali menurun sebesar 1,73% atau yang diterima sebanyak Rp. 378,957,158,444 pada tahun 2010 dan kembali naik sebesar 21,67% atau sebanyak Rp. 483,807,278,567 pada tahun 2011. Perkembangan Belanja Daerah yang setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan ini di karenakan kebutuhan belanja untuk setiap tahunnya tidak sama. Untuk Perkembangan PAD juga mengalami perubahan di 5 tahun terakhir selama 2007-2011. Dimana PAD yang terealisasi terjadi penurunan pada tahun 2008 sebesar 33,65% atau menjadi Rp. 4,209,053,938. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan sebesar 36,21% atau sebesar Rp. 6,598,234,717 dan pada tahun 2010 Penerimaan PAD sebesar Rp. 5,594,269,278 atau mengalami

penurunan sebesar 17,95% dari tahun sebelumnya dan mengalami kenaikan sebesar 40,53% dari tahun sebelumnya atau sebesar Rp. 9,407,280,004 pada tahun 2011. Dengan Perkembangan PAD yang mengalami kenaikan dan penurunan ini dikarenakan PAD bergantung pada aktivitas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan melihat perkembangan dari DAU yang diterima dengan realisasi Belanja Daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Minahasa Selatan, Maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tidak mengutamakan pendapatan dari dana perimbangan dalam hal ini DAU.

Perkembangan Pajak Daerah dilihat dari 5 tahun terakhir 2007-2011 dimana Pajak Daerah yang direalisasi Kabupaten Minahasa Selatan hanya terjadi penurunan pada tahun 2008 sebesar 10,62% atau Rp. 2,206,747,465 yang kemudian terjadi kenaikan secara terus menerus dari tahun 2009-2011. Beda halnya dengan Retribusi Daerah perkembangan selama 5 tahun terakhir terjadi perubahan dimana pada tahun 2008 Retribusi Daerah kabupaten Minahasa Selatan terjadi Penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 58,79% atau Rp. 2,206,747,465 dan pada tahun 2009 terjadi kenaikan sebesar 26,08% atau sebesar Rp.2,145,302,036 dan pada tahun 2010 terjadi penurunan kembali sebesar 88,34% atau Rp.1,139,081,686 dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2011 terjadi kenaikan sebesar 18,53 atau Rp. 1,398,222,820.

Melihat Perkembangan Pajak dan Retribusi Daerah maka dapat disimpulkan Pajak Daerah memberikan hubungan yang signifikan kepada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan Retribusi Daerah belum memberikan hubungan yang signifikan pada Pendapatan Asli daerah Kabupaten Minahasa Selatan terhadap Belanja Daerah Karena Pendapatan Retribusi selama 5 tahun bisa dilihat terjadi perubahan dari tahun ke tahun sehingga Retribusi Daerah mempunyai hubungan yang lemah pada PAD terhadap Belanja Daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan :

1. Perkembangan Dana Alokasi Umum yang diterima Kabupaten Minahasa Selatan selama 5 tahun terakhir mengalami perubahan dari tahun ke tahun selama tahun 2007-2011 dimana tahun 2008 terjadi penurunan jumlah DAU sebesar 28,70% dari periode sebelumnya, dan terjadi peningkatan pada 2009-2011.
2. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan selama 5 tahun terakhir 2007-2011 dimana pada tahun 2008 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya menjadisebesar 15,67%. Pada tahun 2009 meningkat 6,87% dari tahun sebelumnya, dan kembali menurun sebesar 1,73 % pada tahun 2010 dan kembali naik sebesar 21,67% pada tahun 2011.
3. Perkembangan PAD mengalami perubahan di 5 tahun terakhir selama 2007-2011. Dimana PAD yang terealisasi terjadi penurunan pada tahun 2008 sebesar 33,65%. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan sebesar 36,21% dan pada tahun 2010 Penerimaan PAD mengalami penurunan sebesar 17,95% dari tahun sebelumnya dan mengalami kenaikan sebesar 40,53% dari tahun sebelumnya pada tahun 2011.
4. Perkembangan Pajak Daerah selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan selama 2007-2011 secara langsung Pajak Daerah sudah memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah terhadap besarnya realisasi Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ,Halnya dengan Perkembangan Retribusi Daerah selama 2007-2011 yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun sehingga mempunyai hubungan yang sangat lemah pada PAD terhadap realisasi belanja daerah.
5. Hubungan antara DAU dengan Belanja Daerah sebesar koefisien korelasi 0,425 adalah sangat rendah, Demikian juga Hubungan PAD dengan Belanja Daerah adalah sebesar 0,528. Hal ini berarti hubungan antara PAD dengan Belanja daerah adalah Rendah. Dengan demikian Hubungan DAU dan PAD tidaksignifikan terhadap Belanja Daerah. Hubungan antara pajak daerah pada PAD terhadap belanja daerah Minahasa Selatan adalah 0,967. hal ini berarti pajak daerah memiliki hubungan yang kuat pada PAD terhadap belanja daerah. Tetapi hubungan retribusi daerah pada PAD terhadap belanja daerah adalah 0,215, berarti retribusi daerah belum memberikan kontribusi kepada PAD.

Saran

Saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa besarnya DAU dan PAD kurang memberikan kontribusi kepada Belanja Daerah, oleh karena itu diharapkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan lebih meningkatkan Potensi Daerah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar dapat menunjang kegiatan Belanja Daerah.
2. Pajak dan retribusi merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah, Oleh karena itu penulis menyarankan Pemerintah mengintensifkan terhadap penagihan Pajak daerah juga lebih meningkatkan Retribusi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Saroji, Aan Anwar.2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Di Jawa Tengah Tahun 2008.*Skripsi*.Universitas Negeri Semarang. Semarang
- Bastian, I .2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*.Erlangga. Jakarta.
- Darise,N. 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan BLU*. Indeks . Jakarta.
- Utami, Indah Agustini Tri.2007. Analisis Hubungan Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Rutin Kota Samarinda. *Jurnal ISSN:0216-6437 Vol.8 No.1*.Politeknik Negeri Samarinda.Samarinda
- Kuncoro, M. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*.Erlangga. Jakarta.
- Mahsun M., Sulistiyowati F., Purwanugraha H. 2006.*Akuntansi Sektor Publik*.BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi keempat. ANDI.Yogyakarta.
- Siahaan, P. M .2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*.RajaGrafindo Prasada. Jakarta.
- Sugiyono.2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.Alfabeta.Bandung.
- Republik Indonesia.Undang-undang RI No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Jakarta.
- _____. Undang-undang RI No.25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Jakarta.
- _____. Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Jakarta.
- _____.Undang-undang RI Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.Jakarta.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.Jakarta